

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM FUNGSI LEGISLASI PADA KONSTITUSI
INDONESIA**

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh gelar Magister Hukum Pada
Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas
Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

BILLYCO WINDY PAMUNGKAZ

NPM: 22310026

PRODI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

TESIS

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI
LEGISLASI PADA KONSTITUSI INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**

Diajukan oleh:

BILLYCO WINDY PAMUNGKAZ

NPM: 22310026

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal

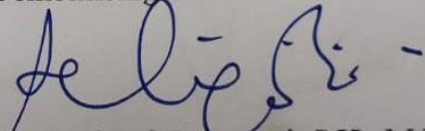
Oleh

Pembimbing 1



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.
NIDN. 0723036801

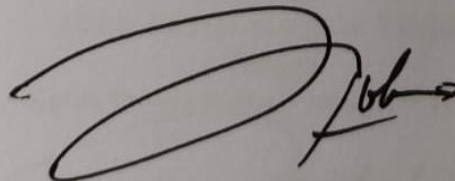
Pembimbing 2



Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.
NIDN. 0724018906

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.
NIDN. 0723036801

TESIS

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI
LEGISLASI PADA KONSTITUSI INDONESIA**


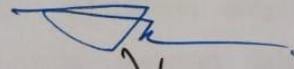
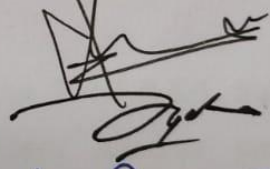
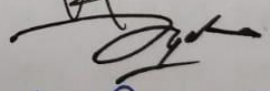
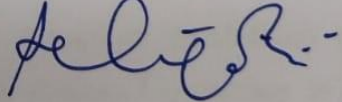
Dipersiapkan dan disusun oleh:

Billyco W Pamungkaz
NPM: 22310026

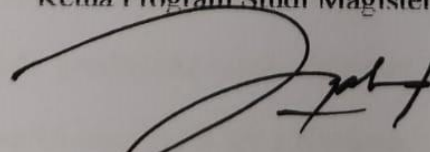
Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal:.....

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan Penguji
Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.	Ketua	
Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Joko Nur Sariyono, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk Memproleh gelar Magister
Tanggal
Ketua Program Studi Magister Hukum



Dr. Joko Nur Sariyono, S.H., M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Billyco Windy Pamungkaz

NPM : 22310026

Alamat : Jl Sedayu IX Nomor 16, Surabaya (60178)

No. Telp : 0812-3512-0416

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi Pada Konstitusi Indonesia” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 18 Juli 2024

Yang Menyatakan


Billyco Windy Pamungkaz
NPM. 22310026

KATA PENGANTAR

Terucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah memberikan nikmat kesempatan serta petunjuk sehingga penulis dapat melalui semester demi semester di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma dan pada akhirnya pada momen ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa magister yaitu tesis.

Penulis menyadari Tesis ini banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan pengampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan tesis ini termasuk para peneliti selanjutnya. Dan tidak akan pernah selesai tanpa bantuan para pihak yang selalu mendukung dan memberikan masukan-masukan yang membangun dan menjadikan penulis selalu semangat dalam mengerjakan tesis ini, penulis sampaikan terimakasih tidak terhingga. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang memiliki perananan langsung selama penulis menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa maupun dalam tahapan penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr., Sp. T.H.T.B.K.L. Subsp. Onk (K). FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
3. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister.

4. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Ibu Peni Jati Setyowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan ilmunya dan telah membantu selama proses Studi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma
7. Kepada Orang tua saya Bpk Iswanto Dan Almh, Triyanti Mei Retno Sriharti yang selalu mendukung dalam hal pendidikan dalam hidup saya.
8. Kepada seluruh rekan-rekan Program Magister Ilmu Hukum yang selalu memberikan semangat, untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi khalayak umum, khususnya bagi dunia hukum.

Surabaya, __ Juli 2024

Hormat Penulis

Billyco W Pamungkaz
NPM: 22310026

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Pernyataan Orisinalitas.....	v
Daftar Isi.....	vi
Abstak	viii
Abstract	xi
No table of contents entries found.DAFTAR BACAAN	83
Tabel	79

ABSTRAK

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislatif pada konstitusi Indonesia, hal ini menjadi pokok utama pembahasan pada tesis ini. Berdasarkan judul tersebut penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi berdasarkan konstitusi dan bagaimana batasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal perancangan Undang-Undang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu proses penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini mengkaji dengan cara mengumpulkan berbagai data sekunder seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis memakai Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menganalisa objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama Kedudukan DPD dalam fungsi legislasi berdasarkan konstitusi yaitu sebagai Lembaga negara legislasi yang mengimbangi fungsi dari DPR, hal ini dibuktikan bahwa DPR selalu menjalankan fungsinya secara berkesinambungan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), baik dalam hal Rancangan Undang-Undang sampai pelaksanaan Undang-Undang. Kedua bahwa Batasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal Perancangan Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya bisa menyerahkan usul rancangan Undang-Undang terkait permasalahan tertentu, seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pajak, APBN, pendidikan, dan agama.

Kata kunci: Kedudukan DPD, Batas Kewenangan DPD, dan Konstitusi.

ABSTRACT

The authority of the Regional Representative Council in legislative functions in the Indonesian constitution is the main topic of discussion in this thesis. Based on this title, the author formulates two problem formulations, namely what is the position of the Regional Representative Council in its legislative function based on the constitution and what are the limits of the authority of the Regional Representative Council in terms of drafting laws.

In this research, the author uses a normative legal research method, namely a research process to discover legal rules, legal principles and legal doctrine in order to answer the legal issues being discussed. This research examines by collecting various secondary data such as documents, laws and regulations, and books related to the research object. In this research, the author uses Law No. 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council and the 1945 Constitution to analyze the research object.

Based on the results of this research, it can be concluded that the first position of the DPD in its legislative function is based on the constitution, namely as a legislative state institution that balances the function of the DPR. This is proven by the fact that the DPR always carries out its functions continuously with the Regional Representative Council (DPD), both in terms of Bills. - Law until the implementation of the Law. Second, the Regional Representative Council's authority limit in terms of drafting laws is that the Regional Representative Council (DPD) can only submit proposals for draft laws related to certain issues, such as regional autonomy, central and regional relations, formation, expansion and merger of regions, management. natural resources and other economic resources, taxes, APBN, education, and religion.

Keywords: Position of DPD, Limits of DPD Authority, and Constitution.